

RIHLAH

P-ISSN: 2339-0921

E-ISSN: 2580-5762

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan

Pengaruh Bugis di Tanah Melayu dalam Perspektif Sejarah Sosial Politik
Saepuddin

Akulturasasi Budaya: Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa
St. Hajar, M. Dahlan M, Syamzan Syukur

Corry Van Stenus, Perempuan dalam Perjuangan Abdul Qahhar Mudzakkar (1950-1965)
Nurul Azizah

Sejarah dan Penyebaran Islam di Asia dan Afrika
Herman Wicaksono

Sarekat Islam Penggagas Nasionalisme di Indonesia
Soraya Rasyid, Annisa Tamara

Bergerak dengan Dua Sayap: Fenomena Gerakan Dakwah dan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia Pasca Reformasi
Aksa



RIHLAH

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan

Editor in Chief	: Dr. Rahmat, M.Pd.
Managing Editor	: Mastanning, S.Hum, M.Hum.
Editorial Board	: Nur Ahsan Syukur, S.Ag, M.Si. : Chaerul Munzir, S.Hum, M.Hum. : Lydia Megawati, S.Hum, M.Hum. : Muhammad Husni, S.Hum, M.Hum. : Zaenal Abidin, S.S., M.H.I. : Chusnul Chatimah Asmad, S.IP, M.M. : Muhammad Arif, S.Hum, M.Hum. : Nurhidayat, S.Hum, M.Hum.
Desain Grafis	: Nur Arifin, S.IP.
Secretariat	: Safaruddin, S.Hum.
Reviewers	: Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A. : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.Ag. : Dr. Hj Syamzan Syukur, M.Ag. : Dr. Nasruddin Ibrahim. : Dr. Abd. Rahman Hamid. : St. Junaeda, M.Hum. : Dr. Rahmawati, MA. : Dr. Nurhayati Syairuddin, M.Hum

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Jln. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa Tlp. 0411-841879 Fax. 0411-822140 (Kampus II) E.Mail. rihlah@uin-alauddin.ac.id

Jurnal Rihlah terbit dua kali dalam setahun, bulan Juni dan bulan Desember berisi kajian tentang Sejarah dan Kebudayaan, baik dari hasil penelitian maupun tulisan ilmiah lainnya.

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik spasi 1 cm pada kertas berukuran A4 dengan tulisan berkisar 12-23 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi oleh Dewan Penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan konten tulisan.

Saepuddin	01-17
<i>Pengaruh Bugis di Tanah Melayu dalam Perspektif Sejarah Sosial Politik</i>	
St. Hajar, M. Dahlan M, Syamzan Syukur	18-30
<i>Akulturası Budaya: Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa</i>	
Nurul Azizah	31-45
<i>Corry Van Stenus, Perempuan dalam Perjuangan Abdul Qahhar Mudzakkar (1950-1965)</i>	
Herman Wicaksono	46-65
<i>Sejarah dan Penyebaran Islam di Asia dan Afrika</i>	
Soraya Rasyid, Annisa Tamara	66-84
<i>Sarekat Islam Penggagas Nasionalisme di Indonesia</i>	
Aksa	85-99
<i>Bergerak dengan Dua Sayap: Fenomena Gerakan Dakwah dan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia Pasca Reformasi</i>	

Pengaruh Orang Bugis Di Tanah Melayu dalam Perspektif Sejarah Sosial Politik

Saepuddin

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

saepudin@stainkepri.ac.id

Abstract

The Bugis diaspora has an influence on the situation and conditions in the region. In this article, a Bugis diaspora in Malaya became the focus of a major study relating to the reasons for his coming in the Johor-Pahang-Riau-Lingga region until the influence after his presence. This study used a multidisciplinary approach compiled from historical sources and past research. From this research, it is noted that the cause of Bugis overseas to various regions in the archipelago was due to political factors from the impact of Bugaya's agreement. The aristocracy of Bugis Daeng Rilakka and its children and troops migrated to the Johor-Pahang-Riau Kingdom and Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah subverted the small King (Kecik king). The collaboration continued until there was a change in the new power structure in which Sultan Sulaiman held the throne with the title of the great host and the Bugis descent as the young man, with the binder of a pledge known as "The Oath of Mercy". Then, there was a cross-breeding between relatives and relatives of his brothers and sisters and caused the adaptation of cultural, social and political. The loyal oath that drove Bugis into Malay.

Keyword: *Adaptation, Daeng, King, Bugis.*

Abstrak

Diaspora orang Bugis telah memberikan pengaruh terhadap situasi dan kondisi di daerah rantau. Dalam artikel ini, diaspora Orang Bugis di Tanah Melayu menjadi fokus kajian utama yang berkaitan dengan sebab-sebab kedatangannya di daerah Johor-Pahang-Riau-Lingga hingga bagaimana pengaruh setelah kehadirannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan multisiplin yang dihimpun dari sumber sejarah dan penelitian terdahulu. Dari penelitian ini diketahui bahwa sebab perantauan Bugis ke berbagai daerah di Nusantara masa itu ialah karena faktor politik dari dampak perjanjian Bugaya. Bangsawan Bugis Daeng Rilakka beserta anak-anak dan pasukannya hijrah ke wilayah kerajaan Johor-Pahang-Riau dan turut Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah menumbangkan Raja Kecil (Raja Kecik). Kolaborasi itu berlanjut hingga terjadi perubahan struktur kekuasaan baru di mana Sultan Sulaiman menduduki tahtanya dengan gelar Yang Dipertuan Besar dan keturunan Bugis sebagai Yang Dipertuan Muda, dengan pengikat sebuah ikrar yang dikenal dengan "Sumpah Setia".

Kemudian, terjadi perkawinan silang di antara kerabat dan sanak saudara keduanya hingga beranak pinak dan menyebabkan terjadinya adaptasi budaya, sosial dan politik. Sumpah setia itulah yang mengantarkan Bugis menjadi Melayu.

Kata Kunci: *Adaptasi, Daeng, Raja, Bugis.*

Pendahuluan

Pekembangan suatu negara bergantung pada dinamika politik yang terjadi. Adapun dinamika politik tersebut terjadi karena ada dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang kadang-kadang dapat memberikan dampak besar terhadap sejarah perjalanan negara. Menurut Ramlah Surbakti, penyebab utama terjadinya perubahan politik ada dua, yakni adanya konflik kepentingan dan adanya nilai-nilai baru yang hendak diadopsi.¹ Dua faktor tersebut, kerap kali konflik kepentingan menjadi penyebab utama dalam perubahan politik suatu negara atau pemerintahan.

Begitu juga yang dialami oleh kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga pada kurun waktu 1699-1913 M. Kerajaan yang merupakan lanjutan dari kerajaan Sriwijaya ini juga telah mengalami pasang surut dinamika sosial politik sejak kerajaan itu berdiri. Salah satu titik kisar dalam perubahan politik itu ialah masuknya kalangan bangsawan Bugis dalam struktur pemerintahan pada 1699. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam sistem tata pemerintahan kerajaan Johor-Pahang-Riau.

Kehadiran bangsawan Bugis dan pengikutnya itu terjadi ketika konflik kekuasaan terjadi di kerajaan Johor-Pahang-Riau saat Raja Kecil merebut tampuk kekuasaan setelah Sultan Mahmud Syah II (1685-1699) mangkat dan tidak memiliki keturunan untuk meneruskan kekuasaan. Padahal, ketika itu Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV (1699-1718) sudah diangkat oleh para bangsawan dan pejabat pemerintahan kerajaan sebagai sultan penerus kerajaan. Anak-anak Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV juga marah besar begitu mereka mengetahui kabar ayahandanya terbunuh. Mereka akhirnya melakukan pertemuan dengan lima orang pembesar keturunan Bugis yang ketika itu berada di Siantan, Natuna. Mereka berlima itu ialah Daeng Perani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Manambo, Daeng Kemase.² Pertemuan tersebut membuahkan kemufakatan berupa bantuan perlawanan terhadap Raja Kecil dengan syarat kalangan Bugis mendapatkan posisi jabatan di kerajaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran bangsawan Bugis tidak lepas dari setting dan dinamika sosial politik yang terjadi di Johor-Pahang-Riau. Kehadiran bangsawan Bugis yang semula hanyalah seorang merantau biasa di tanah Melayu, kemudian berkesempatan memasuki babak baru.

¹Ramlah Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1993). Hlm. 246-246

²Hubungan diplomasi kerajaan Melayu dan Bugis sudah terjalin lama, jauh sebelum masa kerajaan Melayu Islam. Dalam beberapa literatur sejarah, masyarakat Bugis juga pernah membantu kerajaan Kedah dalam melawan serangan dari kerajaan Tiongkok. Sedangkan lima bangsawan dari Kerajaan Luwu itu berhijrah ke negeri Melayu karena mereka menolak perjanjian Bogaya yang menguntungkan VOC dan Kerajaan Bone. Lihat Raja Syofyan Samad, *Negara dan Masyarakat: Studi Penerrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm 99-145.

Ketika Raja Kecil berhasil digulingkan, tampuk kekuasaan kerajaan melayu Islam ini pun kembali pada trah Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Sedangkan yang meneruskan tahta kerajaan itu ialah puteranya yang bergelar Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah (1722-1760). Penobatannya dilakukan oleh para pembesar Bugis dan para timbalan pejabat dari Pahang dan Terengganu yang juga masih memiliki hubungan persaudara. Sejak itu pula, tata pemerintahan di kerajaan Johor-Pahang-Riau itu memiliki struktur baru dengan dua orang pemimpin dari kalangan melayu yakni sultan dengan gelar Yang Dipertuan Besar dan dari kalangan Bugis dengan gelar Yang Dipertuan Muda. Kehadiran lima orang Opu Daeng bersaudara itu, maka sistem politik dan pemerintahan kerajaan Johor-Pahang-Riau pun mengalami perubahan politik dan sosial.³

Gambaran di atas menjadi landasan untuk diteliti lebih lanjut sebab beberapa pertimbangan. *Pertama*, kajian sejarah sosial kerajaan Islam Melayu ini belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Kebanyakan penelitian yang ada lebih banyak pada bidang bahasa, kebudayaan, serta historisitas secara umum. *Kedua*, dua suku bangsa, Melayu dan Bugis, yang melebur menjadi satu kekuatan politik kerajaan telah menunjukkan adanya suatu proses asimilasi demi mengarah pada perubahan yang lebih baik walaupun mereka dipertemukan karena konflik perebutan kekuasaan. *Ketiga*, kajian terhadap sejarah sosial lokal menjadi bagian penting—sejak diberlakukan otonomi daerah—guna mengetahui sejarah. *Keempat*, dengan kajian ini akan melengkapi kajian-kajian sejarah, khususnya sejarah sosial, dari kajian di bidang keilmuan lainnya.

Beranjak dari latar belakang di atas, maka kajian ini akan berfokus tentang bagaimana latar belakang sosial politik kehadiran Bangsawan Bugis dalam Struktur Kerajaan dan apa saja perubahan sosial politik yang terjadi pada kerajaan pasca kehadiran Bangsawan Bugis? Namun harus diakui juga bahwa telah banyak penulis yang mengupas perihal sejarah kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga dari berbagai tinjauannya dan lebih banyak lagi yang mengkaji perihal bahasa dan sastranya. Apalagi telah jamak diketahui bahwa bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Melayu Riau dengan sang pelopornya Raja Ali Haji. Oleh sebab itu, kajian perihal pengaruh politik ini masih terjadi kekosongan sehingga layak untuk ditelaah lebih mendalam.

Sejarah dalam Perspektif Fungsionalisme Struktural

Sebagaimana diungkapkan oleh Helius Sjamsuddin, metode sejarah terdiri dari tiga tahap yaitu: 1) heuristik; 2) kritik; dan 3) historiografi.⁴ Sebagai langkah awal dalam penelitian sejarah yang harus dilakukan adalah heuristik, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah. Menurut Kuntowijoyo, dalam penelitian sejarah sosial memerlukan strategi berupa model yang berfungsi sebagai inspirasi heuristik dalam pencarian, pengumpulan

³Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam* Hlm. 191. Lihat juga Raja Syofyan Samad, 2010, *Negara dan Masyarakat* hlm. 140

⁴ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hal 17.

dan penyusunan⁵. Maka, kajian ini merupakan kajian sejarah yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai obyek kajiannya.

Langkah kedua dalam penelitian ini adalah melakukan kritik, baik kritik internal maupun kritik eksternal. Kritik internal terkait dengan keabsahan atau kecocokan isi teks. Sedangkan kritik eksternal dilakukan untuk menguji keabsahan jenis kertas atau asal-usul penemuan manuskrip. Data yang terhimpun selanjutnya ditelaah sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

Sebagai langkah akhir dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Tahapan ini mencakup penafsiran (*interpretasi*), penjelasan (*eksplanasi*) dan penyajian (*ekspose*) atau pemaparan sejarah. Ketiga tahapan ini sebenarnya bukan merupakan kegiatan terpisah melainkan dilakukan secara bersamaan.⁶ Data yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan laporan penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu tema akan dibahas, diuraikan dan diuraikan.⁷ Hasil dari penggalian data tersebut selanjutnya dianalisa menggunakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penyampainya, maka penulis menggunakan pola induktif, yakni dengan menguraikan pokok-pokok yang menjadi pembahasan, kemudian melakukan pemetaan lebih detail atas pokok dan diakhiri dengan suatu simpulan.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan pendekatan sosial dan politik. Sejarah sosial diartikan sebagai penulisan sejarah yang menempatkan masyarakat sebagai bahan kajian.⁸ Dalam hal ini, teori sosial yang menjadi pisau analisis ialah teori struktur fungsional yang dipopulerkan oleh Talcott Persons, sebagaimana dikutip dari Damsar. Dalam perspektif teori fungsionalisme, aktor (dalam hal ini adalah penguasa) berfungsi untuk menjaga “kesimbangan” sistem agar bisa berjalan secara kesinambungan. Penguasa yang tidak bisa memberikan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman kepada rakyatnya akan mendapatkan perlawanan dari rakyat. Begitu juga rakyat merasa hak-haknya telah terlindungi dengan baik oleh penguasa, akan memberikan dukungan untuk meralisasikan tujuan utama dari bernegara. Oleh sebab itu, seorang penguasa merupakan aktor yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi berdasarkan pada norma-norma dan nilai yang telah berlaku dalam masyarakat.⁹

Dalam penelitian ini, nalar fungsionalisme yang digunakan ialah melihat tindakan aktor dari fungsi integratifnya (I) yang berpengaruh terhadap sistem kepribadian, lalu sistem kepribadian itu akan menjadi fungsi adaptasi (A) yang berdampak pula pada sistem perilaku, kemudian hasilnya akan menjadi fungsi pencapaian tujuan (G) yang juga akan berdampak pada sistem budaya, lantas hal itu akan memunculkan fungsi latensi (L) yang berpengaruh terhadap sistem sosial dan

⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hal 42.

⁶ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hal 156.

⁷ Lihat Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, hlm. 336

⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hal. 42.

⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hlm. 81-82

politik. Dengan demikian, menurut hemat penulis, teori fungsionalisme Talcott Persons sangat relevan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Opu Daeng dan Diaspora Bugis di Tanah Melayu

Historiografi Nusantara mencatat peranan penting orang Bugis-Makassar¹⁰ dalam pelayaran. Mereka dikenal sebagai saudagar pelayaran dan ahli navigasi yang ulung.¹¹ Hal inilah yang kemudian mengantarkan mereka mengenal beberapa daerah lain di luar Sulawesi hingga Nusantara, kota-kota perdagangan di pantai Asia Tenggara, Tiongkok dan juga India.

Dalam sejarah, orang Bugis perantauan di tanah Melayu paling terkenal ialah Opu Daeng Rilakka bersama dengan lima orang puteranya; Opu Daeng Perani, Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Marewah, Opu Daeng Celak, Opu Daeng Kemasi. Ia merupakan seorang bangsawan putera seorang raja Bugis yang merantau karena tidak setuju dengan perjanjian Bungaya. Ia merantau ke Batavia lalu melanjutkan perjalanan ke Siantan di Pulau Natuna. Opu Daeng Rilakka kemudian menemui seorang nakhoda yang masyhur dikenal Nahkoda Alang. Nahkoda Alang berasal dari Bugis dengan nama Qori Abdul Karim atau Karaeng Abdul Karim.¹² Artinya, sebelum perantauan Daeng Rilakka bersama lima orang puteranya, ada orang Bugis yang telah terlebih dahulu menetap di tanah Melayu. Karaeng Abdul Karim ini adalah seorang nakhoda dan juga saudagar yang melayani pelayaran dan perdagangan di sekitar laut China Selatan dan juga ke kepulauan Batam dan Bintan.

Selain Daeng Rilakka, terdapat juga seorang bangsawan dengan pasukannya, yakni Daeng Matekko. Ia adalah saudara dari La Maddukelleng Arung Singkang Sultan Pasir sehingga ia termasuk keturunan bangsawan. Daeng Matekko bersama pengikutnya yang terdiri dari beberapa pelaut-pelaut tangguh Wajo, justru membela

¹⁰Pada mulanya Bugis dan Makassar adalah dua suku yang berbeda. Orang Bugis merupakan kesatuan dari masyarakat yang hidup di bawah kerajaan Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang. Sedangkan orang Makassar adalah mereka yang hidup di kerajaan Gowa. Hubungan antara Bugis dan Makassar terjalin karena adanya pertalian pernikahan, khususnya di kalangan kerluarga kerajaan. dan pada era kolonialisme Belanda, masyarakat keduanya banyak merantau karena situasi dan kondisi di daerah mereka yang tidak kondusif. Kala perantauan itulah banyak orang Makassar disebut atau mengaku sebagai Bugis.

¹¹Meski terkenal sebagai pelaut, masyarakat Bugis juga mahir dalam pertanian dan kerajinan. Masyarakat Bugis di daratan sangat mahir dalam bidang ini sedangkan masyarakat bugis di pesisir mahir pula di dunia pelayaran. Lihat Christian Palres, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006), hlm. 263-320

¹²Dalam beberapa sumber ia disebut dengan Karaeng Abdul Karim. Namun tidak sedikit yang mengatakan ia adalah seorang nakhoda dan saudagar dari Bugis. Dalam versi cerita rakyat lainnya, ada yang menyebutkan ia adalah nakhoda kerajaan Johor yang membelot dan menjadi lanun atau parompok yang justru tewas di tangan orang Bugis yang diperintahkan sultan untuk memberantas lanun-lanun dari negeri Siam, Campa dan Kamboja. Menurut penulis, kemungkinan hikayat yang paling kuat ialah sebagaimana yang dibahas ini.

Raja Kecil.¹³ Setelah kalah peperangan tersebut, para pendukung Daeng Matekko mengikuti Raja Kecil ke Kuatan membangun kerajaan Siak. Di sinilah mereka menetap dan tumbuh bersama masyarakat Melayu daratan Sumatera dan juga menjadi bagian dari kekuatan kerajaan Siak.¹⁴

Ketika perang saudara usai, daerah ini mulai berbenah dan mulai fokus membangun fondasi ekonomi dan sosialnya. Pada masa itulah tumbuh perkampungan Bugis di Tanjungpinang yang namanya juga kekal hingga saat ini karena banyaknya orang-orang Bugis dan atau keturunan Bugis. Pulau Bayan, yang saat ini masuk dalam wilayah kampung Bugis, kala itu menjadi benteng pertahanan Raja Haji menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda Johor Riau. Sedangkan para laksar kerajaan juga banyak keturunan Bugis ketika turut mendukung Opu Daeng lima bersaudara dalam setiap peperangan yang dilakukannya. Sehingga bisa dimaklumi bila di pulau Bayan dan juga kampung Bugis banyak didiami oleh warga Bugis atau keturunan Bugis. Kampung Bugis tersebut, juga menjadi bagian karakter masyarakat perantau yang selalu hidup berdekatan karena ikatan kedaerahan dan untuk menjaga tradisi kebudayaan mereka sembari beradaptasi dengan kebudayaan daerah tempatan.

Sumpah Setia: Menjadi Melayu

Kedatangan Raja Kecil, sultan dari kerajaan Siak keturunan Minangkabau, ke kerajaan Johor-Pahang-Riau telah menjadi titik balik bagi sejarah kerajaan melayu itu. Raja Kecil mengaku sebagai anak dari Sultan Mahmud Syah II, Sultan Johor Pahang yang telah wafat pada 1699, lalu digantikan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Raja Kecil hendak merebut tahta kerajaan dari Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Dalam pertempuran berbulan-bulan, Raja Kecil berhasil memukul mundur seluruh armada laut kerajaan Johor-Pahang tanpa ampun serta memporakporandakan kekuatan daratnya.

Keberhasilan Raja Kecil menyerang Johor karena mendapatkan dukungan dari sebagian bangsawan di Johor serta sebagian penduduk di Temasik (Singapura).¹⁵ Mereka percaya bahwa Raja Kecil merupakan keturunan sah dari

¹³Menurut Wahyudin Hamid, kedua pihak itu tidak satu suara prihal dukungan dalam kemelut kekuasaan di Johor karena latar belakang historis. Opu Daeng lima bersaudara merupakan keturunan Bugis sedangkan Daeng Matekko adalah keturunan Wajo yang turut membantu Gowa dalam penaklukan kerajaan Bugis kala itu. Lihat Wahyuddin Hamid, *Pasoppe Bugis Makassar II*, Jakarta Telaga Zaman, 2005, hlm. 36

¹⁴Hal ini belum terlalu mendapatkan banyak kajian sebab di kalangan Johor dan Riau, Raja Kecil termasuk orang mencederai sejarah Johor. Ia pun termasuk orang kalah yang dalam penulisan sejarah memang sering tidak mendapatkan tempat yang layak. Bahkan dari beberapa kajian sejarah antara Kerajaan Siak dan Johor-Riau tampak beberapa perbedaan yang mencolok. Seakan ada “keberpihakan” dalam menginterpretasikan fakta sejarah.

¹⁵Menurut Raja Syofyan Samad, dukungan yang diberikan oleh masyarakat Suku Laut kepada Raja Kecil karena kecewa terhadap pemerintahan kerajaan Johor yang dinilai tidak memberikan perhatian kepada mereka. Lihat Raja Syofyan Samad, *Negara dan Masyarakat: Studi Penerrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm.

Sultan Mahmud Syah II yang telah memerintah selama 14 tahun (1685-1699). Pertempuran itu bukanlah perang yang mudah bagi kedua belah pihak. Saudara dari Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV yang memimpin pasukan pertahanan kerajaan, Tun Mahmud, telah gigih berjuang menghalangi pasukan Raja Kecil memasuki wilayah Johor. Ia juga sempat terpukul mundur dan memindahkan pasukan ke Pancur untuk bertahan dan mengatur strategi perlawanan. Namun, Raja Kecil terus memburunya hingga Tun Mahmud turut meninggal dalam medan pertempuran itu.¹⁶Pada Maret 1718, Johor telah ditaklukan sepenuhnya oleh Raja Kecil.

Setelah hampir tiga tahun lebih Raja Kecil berkuasa di kerajaan Johor-Pahang, singgasananya mulai digoyang. Isu perihal ketidakabsahannya sebagai pewaris tahta kerajaan mulai menyebar dan terus menyeruak di kalangan masyarakat, pembesar kerajaan, serta para saudagar. Sementara di sisi lain, anak-anak dari Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV juga melakukan perlawanan. Puncak dari perlawanan itu adalah ketika Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV tewas dibunuh oleh pasukan Raja Kecil dalam perjalanan dari Johor ke Riau.¹⁷Anak-anak Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV juga marah besar begitu mereka mengetahui kabar tersebut. Mereka akhirnya melakukan pertemuan dengan lima orang pembesar keturunan Bugis yang ketika itu berada di Siantan. Mereka berlima itu ialah Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celak, Daeng Manambo, Daeng Kemasek, yakni putera dari Daeng Rilakka.¹⁸ Pertemuan tersebut membuahkan kemufakatan berupa bantuan perlawanan terhadap Raja Kecil dengan syarat kalangan Bugis mendapatkan posisi jabatan di kerajaan. Usai perang saudara yang mengabdikan waktu 10 hari itu, akhirnya Raja Kecil takluk dan memilih untuk menepi daerah Sumatera.

Sejak saat itu, tampuk kekuasaan kerajaan melayu ini pun kembali pada trah Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Sedangkan yang meneruskan tahta kerajaan itu ialah puteranya yang bergelar Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Penobatannya dilakukan oleh para pembesar Bugis dan juga para timbalan pejabat dari Pahang dan Terengganu yang juga masih memiliki hubungan persaudaraan. Hubungan keduanya diikat dengan sumpah setia Melayu-Bugis. Naskah-naskah klasik memperlihatkan beberapa poin penting dari sumpah setia ini ialah terkait dengan pembagian kekuasaan. Misalnya dalam *Kitab Silsilah Melayu dan*

¹⁶Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam* (Ahmad Fauzi Basri, penerjemah), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991), hlm. 187-189.

¹⁷Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam*, hlm. 198

¹⁸Hubungan diplomasi kerajaan Melayu dan Bugis sudah terjalin lama, jauh sebelum masa kerajaan Melayu Islam. Dalam beberapa literatur sejarah, masyarakat Bugis juga pernah membantu kerajaan Kedah dalam melawan serangan dari kerajaan Tiongkok. Sedangkan lima bangsawan dari Kerajaan Luwu itu berhijrah ke negeri Melayu karena mereka menolak perjanjian Bogaya yang menguntungkan VOC dan Kerajaan Bone. Lihat Raja Syofyan Samad, 2010, *Negara dan Masyarakat*, hlm 99-145

Bugis dan Sekalian Raja-rajanya dituliskan perihal kisah perihal sumpah setia yang pertama kali dilakukan.

”Kemudian berkata Opu-opu yang berlima itu kepada Raja Sulaiman, “adapun yang seperti permintaan Raja Sulaiman kepada saya semua itu, saya terimalah. Akan tetapi hendaklah kita semua ini berjanji dahulu betul-betul.” Maka Jawab Raja Sulaiman, “baiklah. Dan khabarkanlah oleh Opu-opu itu boleh saya dengar.” Syahdan berkata pula Opu Daeng Perani, “Adapun jika jaya pekerjaan saya semua ini sekali lagi melanggar Siak, maka sebelah Raja Sulaiman menjadi Yamtuan Besar sampailah kepada turun menurunnya, dan saya semuanya menjadi Yamtuan Muda sampailah kepada turun-menurunnya juga, tiada boleh yang lain, Maka boleh pilih saja yang lima beradik ini, mana-mana jua yang disukai oleh orang banyak, maka dianya itulah yang jadi Yamtuan Muda, tiada boleh tiada. Dan lagi pula Yamtuan besar jadi seperti perempuan saja, jika diberinya makan baharulah makan ia. Dan Yamtuan Muda jadi seperti laki-laki. Dan jika datang satu-satu hal atau apa-apa juga bicara, melainkan apa-apa kata Yamtuan Muda.” Syahdan sekali perjanjian kita mana-mana yang tersebut itu, tiada boleh diobahkan lagi. Maka boleh kita semua pakai sampai kepada anak cucu cicit turun temurun kita kekalkan selama-lamanya.”

Sumpah setia ini telah membawa Bugis menjadi Melayu seutuhnya karena telah menjadi bagian dari penguasa di kerajaan.¹⁹ Dampaknya, sebagaimana telah disebutkan dalam pada kutipan di atas, bahwa terdapat dua pemimpin, Yamtuan atau Yang Dipertuan Besar (YDB) yakni sultan itu sendiri dan Yamtuan atau Yang Dipertuan Muda (YDM) yakni dari kalangan Bugis. Sejak itu pula, struktur dan tata pemerintahan di kerajaan Johor-Pahang-Riau berubah dengan dua orang pemimpin, dari pihak keturunan Melayu menduduki posisi sultan dengan gelar Yang Dipertuan Besar (YDB) dan dari kalangan Bugis mengisi jabatan setingkat di bawah sultan dengan gelar Yang Dipertuan Muda (YDM) atau sering disebut juga dengan Raja Muda. Dampak dari kehadiran lima orang Opu Daeng bersaudara membuat sistem politik dan pemerintahan kerajaan Johor-Pahang-Riau pun mengalami perubahan.²⁰

¹⁹Menurut Aswandi Syahri, aturan Setia Bugis Dengan Melayu ditulis sebagai salah upaya untuk membangun legalitas historis raja-raja Bugis dalam struktur baru sebuah pemerintah kerajaan Melayu Johor (cikal bakan Riau-Lingga-Johor-Pahang), yang tergambarkan dalam seluruh narasinya. Lihat Aswandi Syahri, *Manuskrip Aturan Setia Bugis dengan Melayu*, Tanjungpinang Pos Edisi Online, <http://tanjungpinangpos.id/manuskrip-aturan-setia-bugis-dengan-melayu/> (diakses Agustus 2019).

²⁰Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam*, hlm. 191. Lihat juga Raja Syofyan Samad, 2010, *Negara dan Masyarakat* hlm. 140 dan D.G.E Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm.318-319. Dalam kenyataannya, gesekan antara Bugis dan Melayu juga terjadi sepanjang sejarah kerajaan. Oleh sebab itu, sumpah setia ini terus diperbaharui hingga sampai tujuh kali. Dan yang terakhir atau ketujuh tersebut yakni Sumpah Setia Melayu-Bugis oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dengan Yang Dipertuan Muda, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi.

Kehadiran Bugis dalam struktur pemerintahan kerajaan Johor-Pahang-Riau itu telah mempengaruhi struktur pemerintahan pada kerajaan Melayu lain dengan menggunakan istilah yang sama ataupun serupa, yakni Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda. Kolaborasi kepemimpinan Melayu dan Bugis ini menghasilkan sinergi perjuangan yang solid dalam melawan kolonialisme Belanda. Pertempuran dalam perang Riau yang dipimpin Raja Haji bukti konkrit patriotisme dalam membela tanah air.²¹

Pengaruh Struktur Fungsional Setelah Kehadiran Orang Bugis

Sejarah hanya akan menjadi bahan hafalan belaka apabila tidak diinterpretasikan secara tepat untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Sejarah masa lalu menjadi penting agar bisa mendapatkan gambaran yang baik bagi kehidupan di masa kini dan yang akan datang. Dalam hal ini, perubahan-perubahan yang terjadi pascakehadiran Bugis di tanah Melayu pada periode kerajaan Johor Pahang Riau Lingga akan menjadi fokus kajian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Maka dari itu, analisis ini tidak lepas dari penggunaan teori-teori sosial, yang dalam penelitian ini menggunakan struktural fungsional.

Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa ada kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial masyarakat. George Ritzer, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah “setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.”²² Kecendrungan teori ini menitikberatkan pada satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat.

Dari gambaran pada bagian-bagian sebelumnya, mulai tersingkap beberapa perubahan yang terjadi dalam struktur maupun fungsi dalam kerajaan dan masyarakat Melayu itu sendiri. Kehadiran bangsawan Bugis bersama dengan para pekerjanya itu telah memberikan dampak terhadap situasi dan kondisi, sosial dan budaya, serta ekonomi dan politik yang ada di dalam kerajaan Melayu itu.

Struktur dan Wajah Baru Kekuasaan

Kekuasaan dalam tradisi Melayu memiliki jenjang struktur yang dinamis dan bersifat natural menyerupai organisme kehidupan. Dalam beberapa karya klasik Melayu, disebutkan tentang konsep kekuasaan yang menjadi idaman. Seperti dalam karya Raja Ali Kelana, *Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, disebutkan bahwa sebuah kerajaan yang merdeka ibaratkan seorang manusia.

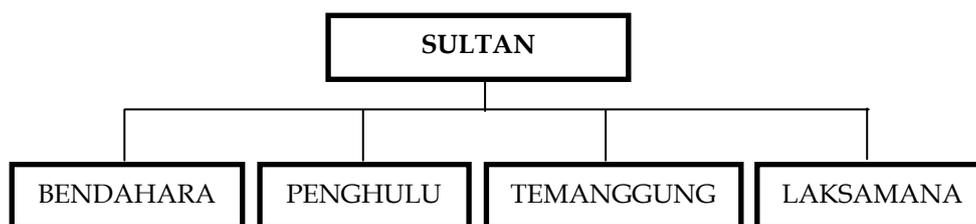
²¹Abdul Malik, dkk., *Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah*, (Lingga: Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri), hlm. 40-47

²²George Ritzer dan Gouglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm.118.

Bermula adalah kerajaan itu dapat dibangsakan dengan seorang manusia yang akil, balig, merdeka, sejahtera daripada penyakit yang memberi mudharat pada tubuhnya. Dan ialah juga dinamakan ('alam shugra).Telah berkata oleh yang berkata, "maka apabila cedera oleh satu anggota daripada segala anggota akan sesuatu daripada wadhifahnyanya, niscaya cedera aturan tubuh. Dan berseru-seruanlah oleh bina-binaannya kepada penyakit yang memakan diri dan rusak."Dan seumpama yang demikian mamlakah, istimewa lagi kepala mamlakah itu.²³

Kepala mamlakah yang berarti sultan, imam, khalifah, amir, dan raja, adalah penguasa tertinggi dalam sebuah kerajaan.²⁴Kekuasaan kerap kali diidentikkan dengan dirinya dalam sistem monarki karena kekuasaan bersifat turun temurun.Keistimewaan sebagai penguasa ialah karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi tersebut.Ia merupakan orang yang terpilih saja yang bisa mendudukinya, baik karena nasabnya ataupun karena suatu kesepakatan bersama untuk memilihnya. Dalam fenomena kekuasaan di Johor-Pahang-Riau-Lingga, kekuasaan memang bersifat keturunan, tetapi mengalami perubahan ketika masuknya keturunan Bugis dalam struktur kekuasaan sebagai bentuk kesepakatan di antara keduanya.Kekuasaan itu terbangun dari sumpah setia di kalangan elite untuk menegakkan kekuasaan yang menjaga seluruh wilayah dan rakyatnya.

Dalam praktiknya pada kekuasaan di kerajaan Johor-Pahang-Riau, struktur kekuasaan mengikuti struktur lama sejak era imperium Malaka. Sultan dibantu oleh beberapa perangkat aparaturnya yang terdiri daripada Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Sistem ini dikenal juga dengan sistem empat belipat, yakni di bawah empat orang penting tersebut terdapat delapan aparatur yang membantunya dan di bawah masing-masing dari yang delapan orang ini terdapat enam belas orang pembantu lainnya. Berikut adalah skema umum tentang struktur kekuasaan kerajaan Johor-Pahang-Riau.



Struktur kekuasaan seperti di atas ini berlaku kerajaan Melayu Islam dari imperium Malaka hingga era pemerintahan di Johor. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Datuk bendahara

²³Raja Ali, *Kumpulan Ringkas*, hlm. 4

²⁴Konsep tentang pemikiran politik ini bisa juga dibaca dalam Abd. Rahman, *Konsep Mamlakah dan Keharusan Masalah dalam Pemikiran Etika Kekuasaan Raja Aki Kelana*, Yogyakarta, Pascasarjana, 2016.

bertugas sebagai menteri utama yang memberikan penasihat raja dalam bidang pentadbiran. Ia juga menjadi ketua hakim dan angkatan perang di darat. Yang tidak kalah penting, posisi bendara adalah sebagai pelaksana tugas sultan ketika sultan sedang sakit atau berada dalam perjalanan ke luar negeri. Sedangkan tugas pengulu atau disebut juga penghulu bendahari ialah mengurus sumber pemasukan dan pengeluaran negara, yakni berhubungan dengan pajak, upeti, pajak pelabuhan. Posisi yang melekat padanya ialah ketua bagi semua bendahari, ketua urusetia istana dan ketua semua syahbandar. Sementara posisi temanggung ialah penjaga keamanan dalam negeri dan penegak peraturan perundang-undangan. Jabatan yang melekat padanya ialah sebagai ketua polisi, ketua protokoler istana dan bertugas juga sebagai hakim di darat. Adapun posisi Laksamana bertugas sebagai penjaga keamanan laut. Posisi komando yang berhubungan dengan laut berada di bawah koordinasinya, termasuk memastikan keamanan perjalanan sultan di laut. Ia juga menjadi duta bagi sultan untuk urusan luar negeri.

Struktur ini berubah sejak terjadinya pembagian kekuasaan antar Melayu dan Bugis di era pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sebagai hasil sebuah kesepakatan atas kerjasama yang dijalin dalam merebut singgasana kerajaan dari Raja Kecil. Ketika itu, Daeng Rilekka dengan anak-anaknya yang lima itu menerima tawaran untuk membantu pihak Sultan Sulaiman mengambil kekuasaan direbut oleh Raja Kecil usai membunuh Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Ketika perjuangan itu membuahkan hasil, maka perjanjian itu pun dilaksanakan tanpa bisa ditolak oleh Sultan Sulaiman. Kemudian mereka berbagi kekuasaan dengan gelar Yang Dipertuan Besar (YDB) untuk sultan dari pihak Melayu dan Yang Dipertuan Muda (YDM) dari pihak Bugis.

Dalam naskah Melayu disebutkan, kedua orang penting ini juga disebutkan menggunakan gelar sultan, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah tetap menyandang gelarnya sedangkan dari pihak Bugis, yakni Opu Daeng Celak bergelar Sultan Alaudin Syah. Hal itu termaktub dalam naskah sumpah setia Bugis dengan Melayu sebagaimana dikutip oleh Aswandi Syahri,²⁵

“...Kepada Hijrah seribu seratus empat puluh satu tahun dan tahun Zai, maka digantikan oleh Yang Dipertuan saudara Baginda yang bernama Daeng Pali (Daeng Celak)itu jadi Raja Muda, maka bergelar Sultan Alaudin juga. Maka dibaharui juga sumpah setia itu oleh Duli Yang Dupertuan Muda itu dengan Datuk Bendahara dengan Engku Busu, dan segala orang besar-besar...bersumpah setia muafakat tiadalah berubah-ubah...”

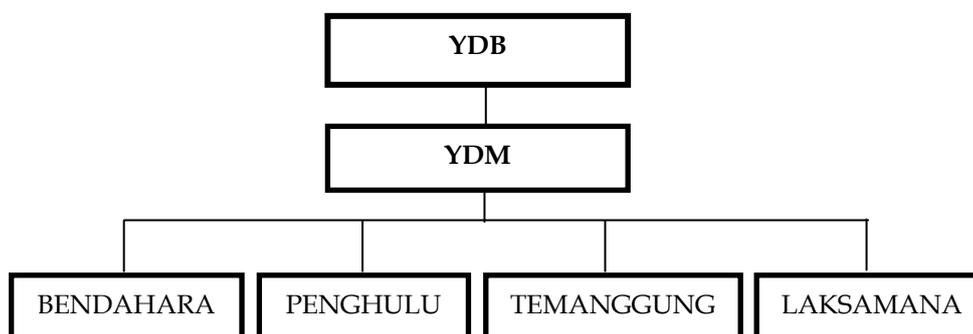
Dalam sebuah manuskrip yang ditampilkan oleh Aswandi itu juga terlihat dua salinan cap di bagian akhir naskah atau surat Sumpah Setia Bugis dengan Melayu.

Pada manuskrip di atas yang ditulis ulang terdapat dua repro bentuk stempel dari dua orang, yakni yang ukuran besar bertuliskan Sultan Ahmad Riayat Syah dan lingkaran kecil bertuliskan Sultan Aliudin Syah. Artinya ada dua matahari dalam satu kerajaan, namun dengan posisi yang berbeda. YDB atau sultan

²⁵Aswandi Syahri, *Naskah Aturan Setia Bugis dengan Melayu*.

memerintah kerajaan dan daerah taklukannya secara umum dan sekaligus sebagai simbol kerajaan, sedangkan YDM adalah pelaksana pemerintahan, termasuk urusan dalam negeri dan urusan luar negeri. Hal ini sangat berbeda sekali dengan struktur atau hirarki kekuasaan pada era sebelumnya.

Dalam historiografi Riau, setelah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah mangkat, posisi sultan diteruskan oleh anak-anaknya. Akan tetapi, ketika anak-anak itu diangkat, usia mereka masih di bawah lima tahun. Dengan demikian, maka pemegang penuh kekuasaan itu adalah YDM di bantu oleh pemangku kekuasaan lainnya, yakni bendahara, penghulu bendahari, temanggung dan laksamana.



Gambaran di atas telah tampak jelas bahwa masuknya orang Bugis di ranah struktur kekuasaan di kerajaan Johor-Pahang-Riau hendak mempertegas posisinya sebagai aktor perubahan di kerajaan ini. Kenyataan dalam sejarah menyiratkan bahwa upaya Bugis menjadi aktor dalam kerajaan melayu menuai sukses. Apalagi dengan cara pembagian kekuasaan—yang menjadikan YDM sebagai pelaksana pemerintahan dan hubungan luar negerinya—telah membuat posisi Bugis semakin menjadi aktor penting dalam sejarah kerajaan Melayu ini.

Penguatan posisi Bugis dalam struktur kerajaan juga sebagai bentuk adaptasi mereka di tanah Melayu. Adaptasi (*adaptation*) sudah menjadi suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam perspektif Talcott Persons, apabila telah beradaptasi, maka selanjutnya perlu mengubahnya ke dalam fasilitas yang bisa digunakan, dan kemudian mendistribusikan ke bagian lain sistem. Intinya, aktor harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhan lingkungannya. Menjadi Melayu adalah bagian dari pencapaian tujuan (*goal attainment*) Bugis. Maka, tidak heranlah bila tindakan penagihan janji pembagian kekuasaan itu dilakukan oleh pihak Bugis sebab ia telah mengalokasikan sumber dayanya untuk memperjuangkan kemenangan dari pihak Raja Kecil. Padahal, di pihak Raja Kecil juga terdapat sepasukan Bugis yang dipimpin oleh Daeng Matekko.²⁶ Dalam kenyataannya, pasukan Daeng Matekko pun akhirnya mengikuti rombongan Raja Kecil ke Siak dan melanjutkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, kelompok Bugis pro Opu Daeng berlima itu menjadi bagian penting dalam struktur kerajaan sekaligus dalam struktur sosial.

²⁶Lihat di bagian sub bab tentang sejarah lima Opu dan peran awalnya sebelum masuk ke struktur kekuasaan kerajaan.

Kemudian Opu Daeng yang berlima tersebut menguatkan sistem kekuasaan dan hirarkinya sebagai pondasi menjalankan sistem dalam bentuk integrasi (*integration*) Melayu dan Bugis. Hal penting untuk menjaga agar pihak Bugis dan Melayu tidak melenceng dari sistem yang diharapkan sehingga sirkulasi kekuasaan berjalan secara benar dan efektif. Dalam perspektif Talcott Parsons, fungsi integrasi bisa terpenuhi apabila bagian-bagian dalam sistem berfungsi sebagai satu kesatuan. Adanya integrasi Melayu-Bugis ini telah menegaskan bahwa kedua pihak telah menjadi aktor yang akan sama-sama mempengaruhi sistem. Keunikan dari pengaruh Bugis ini terletak pada pemeliharaan laten (*latent pattern maintenance*) yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan tindakan suatu sistem sesuai aturan norma agar mampu mempertahankan pola dan mengurangi ketegangan dalam unit sistem. Dalam hal ini, penguat dan kunci dari itu semua ialah adanya sumpah setia Bugis dengan Melayu. Bahkan, ketika sumpah setia ini dipraktikkan sebanyak tujuh kali dalam sejarah kerajaan sejak masuknya Bugis dalam struktur kerajaan, justru memperkuat pemeliharaan latensi yang dilakukan pihak Bugis.

Sumpah setia Bugis dengan Melayu, dalam perspektif struktural fungsional, tidak lain adalah upaya adaptasi yang dilakukan oleh Bugis di Tanah Melayu guna mencapai tujuannya. Bahkan, integrasi dan latensi yang diperlihatkan oleh Bugis dalam pengaruhnya semakin memperkuat tentang sebuah prosesnya untuk menjadi bagian dari Melayu. Ia tidak hanya sekadar menjadi aktor dengan kekuatan struktural saja, melainkan juga memiliki kekuatan fungsional sekaligus. Hal inilah yang membuat Bugis dapat diterima di Tanah Melayu sehingga terjadi proses asimilasi dan akulturasi yang mampu melahirkan fenomena sosial dan kebudayaan baru.

Perkawinan Sosial Budaya

Menjadi perantau yang bisa diterima di tanah rantau, sekaligus masuk dalam struktur masyarakatnya merupakan sebuah proses dalam beradaptasi dengan lingkungan. Jika dalam kekuasaan Bugis memberikan pengaruh dan perubahan secara struktural fungsional, maka dalam kehidupan sosial masyarakat, kebudayaan dan adat-istiadatnya, juga berpotensi saling mempengaruhi. Sebagaimana disebutkan di bagian-bagian sebelumnya, masuknya orang Bugis dalam struktur kekuasaan juga telah menaikan strata sosial bagi kalangan Bugis itu sendiri. Jikalau dahulunya ia seorang perantauan pendatang, maka sekarang telah naik kelas menjadi orang tempatan. Maka, seluruh pengikut Opu Daeng tersebut juga menjadi orang baru Melayu.

Adaptasi sosial dan kebudayaan yang paling tampak ialah terjadi perkawinan silang antara para pembesar dan bangsawan Bugis dan Melayu. Peristiwa penting perkawinan antara pembesar Bugis dan Melayu ini terjadi pertama kali usai peperangan melawan Raja Kecil, ketika para pembesar Melayu dan Bugis bersepakat membicarakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua belah pihak. Ketika itu, perkawinan saling terjadi untuk empat peristiwa, yakni (1) perkawinan antara Daeng Celak dengan Tengku Mandak, yang tak lain adalah adik dari Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sendiri, (2) perkawinan Daeng Menampok dengan

Tengku Tipah, yang tak lain adalah emak saudara (bibi) dari Sultan Sulaiman, (3) Daing Merewah, Yamtuan Muda (1) beristerikan Tun Cik Ayu (Anak Temenggung Riau) yang tak lain adalah janda dari Sultan Mahmud Mangkat Dijulang—yang dinikahi ketika masih sangat muda, (4) perkawinan Daeng Maketok dengan Tun Enah putri dari Marhum Mangkat di Kayu Anak, yang merupakan sepupu Sultan Sulaiman, (5) pernikahan Daeng Masuru dengan Tun Kecil yang juga keponakan Sultan Sulaiman.²⁷

Dalam teks sejarah lainnya juga diceritakan perihal perkawinan antara Daeng Parani dengan Tengku Irang (Tengku Tengah). Daeng Menampo' berkahwin dengan Tun Tipah, adinda Sultan Sulaiman, Daeng Masuro menikahi dengan Tun Kechik dan Daeng Mengeto' berkahwin dengan Tun Aishah.²⁸Selain itu dinyatakan juga perkawinan Daeng Chelak atau Daeng Pali berkahwin dengan Raja Bakal. Turut disebut juga perihal perkawinan antara Raja Haji putera kepada Opu Daeng Chelak dengan Encik Aisyah, dan ketika Encik Aisyah wafat, Raja Haji kemudian dikawinkan dengan Encik Sajik, anak kepada Tengku Raja Amran.²⁹Kawin silang dari pembesar ini telah juga berimbas pada perkawinan kebudayaan dan adat istiadat kedua belah pihak. Hal ini memperkuat posisi Bugis sebagai Melayu baru karena ikatan pernikahan ini menguatkan ikatan darah mereka.

Kawin silang yang demikian itu tidak hanya dilakukan di kalangan pembesar bangsawan dan saudagar saja, melainkan juga pada para bawahan yang justru jumlahnya bisa lebih banyak. Perkawinan silang menjadi penanda meleburkan darah keturunan. Semestinya hal ini ditenggerai sebagai sebuah peleburan identitas yang telah lepas dari pengaruh kesukuannya. Setidaknya itu dibuktikan dengan gelar "Raja" yang melekat pada setiap anak turunan dari bangsawan Bugis secara patriarki. Gelaran itu dipakai dan disandang hingga saat ini dan menjadi satu gelaran kebangsawanan yang tidak hilang. Bahkan, nyaris tidak ada lagi istilah Bugis yang digunakan oleh generasi penerus Opu Daeng berlima. Anak cucu mereka secara perlahan justru menanggalkan gelar-gelar kebangsawanan Bugis dan menggunakan gelar-gelar kebangsawanan Melayu. Maka, tidak heran bila kemudian turunan patriarki dari Melayu menggunakan Tengku atau Engku sedangkan untuk turunan Bugis menggunakan Raja pada nama depan atau gelar kebangsawannya.

Satu adat istiadat yang berubah dalam istana kerajaan ialah tentang pengukuhan atau penabalan sultan (YDB) dilakukan oleh raja muda (YDM). Perangkat yang digunakan antaranya ialah regelia dengan satu di antaranya berupa

²⁷Ayu Nor Azilah dan Wayu Nor Asikin Mohamad, *Interaksi Sosial Masyarakat Johor-Riau Antara Tahun 1600 Hingga 1700 Berdasarkan Karya-Karya Historiografi Terpilih*, Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah Vol. 4 No. 1 (2017).

²⁸Abdullah Zakaria Ghazali, (2002). 'Daeng Chelak Ibni Daeng Rilekkek: Menelusuri Maklumat Daripada Teks Melayu', Jurnal Seri Alam, jil.8, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, hlm. 119.

²⁹Rusphin Mohd. Asyraf Taip. (2003). *Sejarah Politik Negeri Selangor: Kajian Berdasarkan kepada Teks: Hikayat Negeri Johor* (Latihan Ilmiah), Universiti Malaya, Kuala Lumpur, hlm. 58.

cogan, sebuah tombak besar dengan sayap menyerupai daun sirih dengan tulisan silsilah.³⁰Terjadi polemik pada masa suksesi kepemimpinan dari Sultan Mahmud Syah ke penerusnya pada 1795. Hal itu karena ada dua orang putera sultan yang masing-masing memiliki dukungan dari dua kelompok berbeda di kalangan Melayu dan Bugis. Sementara di sisi lain, Sultan pernah mewasiatkan dan menerangkan perihal calon penggantinya dan bahkan sudah mempertemukan keduanya itu. Sultan mempersiapkan Tengku Husen untuk meneruskan tahtanya. Akan tetapi, YDM Raja Jakfar ketika menginginkan Tengku Abdurrahman meneruskan tampuk kekuasaan kerajaan. Pada akhirnya, keduanya sama-sama dikukuhkan. Tengku Husen dikukuhkan oleh Bendahara Pahang dan Tengku Abdurrahman dikukuhkan oleh Raja Jakfar di Lingga. Secara adat istiadat terjadi polemik pengukuhan Tengku Abdurrahman sebab prosedur pengukuhanannya tidak menggunkan regelia, khususnya cogan yang menjadi simbol utamanya. Pengambilan sumpah dilakukan menggunakan nama besar Allah dan menggunakan pendekatan yang lebih Islami. Perubahan secara adat istiadat di lingkungan kerajaan ini juga mempengaruhi adat di istiadat di luar kerajaan, di mana Islam dijadikan rujukan untuk setiap tingkah laku dan perbuatan masyarakat. Dalam hal ini, Islam di kalangan masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai norma agama melainkan juga sebagai sumber nilai perilaku.

Proses asimilasi dan akulturasi di antara Bugis dan Melayu ini tidak tampak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman baru terhadap Islam sebagai agama, norma dan dogma kehidupan masyarakat. Ketika keturunan bangsawan mulai menaruh minat kepada ilmu pengetahuan dan ilmu agama, maka ia kemudian memiliki pengaruh terhadap kebijakan kekuasaan. Dengan demikian, Islam justru mempengaruhi tradisi Bugis dan Melayu sekaligus sehingga praktik-praktik yang dulunya bagian dari tradisi dan adat istiadat melayu ataupun bugis dikoreksi kembali untuk disesuaikan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan pemahaman yang berkembang ketika itu. Beberapa tradisi baru pun hadir, seperti mandi safar, yakni tradisi yang dipercayai sebagai bentuk tolak balak dan mempersucikan diri. Sementara tradisi maulid nabi, juga tidak ada perbedaan signifikan di antara keduanya karena perayaan itu sama-sama dilakukan dalam tradisi Bugis maupun Melayu. Begitu juga dengan tradisi malam tujuh likur pada bulan Ramadan yang berbentuk doa selamat bersama masyarakat kampung diiringi silaturahmi dan memasang pelita ataupun dian di masing-masing rumah. Adat istiadat itu menjadi lebih dan tidak lagi ada pembeda, mana yang menjadi adat Bugis dan mana yang menjadi adat Melayu ketika itu. Semuanya sudah dilakukan seiring dengan pemahaman bentuk dalam meninggikan nilai-nilai agama Islam. Maka cukup jelas sekali bahwa semangat dari tradisi masyarakat di Riau Lingga kala itu bernafaskan pada Islam, bukan bergantung pada karakteristik kebudayaan tertentu.

³⁰Lebih lengkap tentang regelia dan cogan, lihat Aswandi Syahri dan Raja Murad, *Cogan, Regelia Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang*, (Tanjungpinang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2016).

Simpulan

Dari uraian di atas, terdapat dua kesimpulan penting sebagai jawaban permasalahan. *Pertama*, latar belakang kehadiran Bugis di tanah Melayu era kerajaan Johor Pahang Riau, selain dilandasi oleh faktor ekonomi juga faktor politik. Dari faktor politik terjawab bahwa perantaraan mereka karena tidak setuju dengan perjanjian Bongaya. Perjanjian itu membuat sebagian besar pembesar kerajaan-kerajaan Bugis memilih bermigrasi ke daerah-daerah lain seperti Riau.

Kedua, kehadiran Bugis di tanah Melayu telah memberikan dampak besar secara struktur fungsional. Adanya pembagian kekuasaan dalam struktur kerajaan serta sumpah setia Bugis dengan Melayu telah menjadi titik kisar sejarah baru kerajaan Melayu. Sumpah setia merupakan upaya adaptasi yang dilakukan oleh Bugis di Tanah Melayu guna mencapai tujuannya. Bahkan, integrasi dan latensi yang diperlihatkan oleh Bugis dalam pengaruhnya semakin memperkuat tentang sebuah prosesnya untuk menjadi Melayu seutuhnya. Ia tidak hanya sekadar menjadi aktor dengan kekuatan struktural saja, melainkan juga memiliki kekuatan fungsional sekaligus. Dalam hal sosial, perkawinan yang terjadi di antara pembesar Bugis dan Melayu justru menguatkan fungsi pada sistem sosial untuk meredam pergolakan dan pertentangan berdasarkan sukuisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Asba, A Rasyid, *Susur Galur Melayu Bugis*, makalah.
- Adil, Haji Buyong, *Sejarah Johor*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, 1980.
- Ali, Raja (Haji), *Silsilah Melayu Bugis*, (Tanjungpinang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2007).
- Ali, Raja (Haji), *Tuhfah an-Nafis*, dalam Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam*, terj. Ahmad Fauzi Basri, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1991.
- Ali, Raja (Kelana), *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, Singapura: Al-Imam, 1328 H.
- Andaya, Leonard Y., *Diaspora Bugis, Identitas dan Islam di Negeri Malaya*, dalam *Diaspora Bugis Di Alam Melayu*, Makassar: Inninawa, 2010.
- Azilah, Ayu Nor dan Wayu Nor Asikin Mohamad, *Interaksi Sosial Masyarakat Johor-Riau Antara Tahun 1600 Hingga 1700 Berdasarkan Karya-Karya Historiografi Terpilih*, Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah Vol. 4 No. 1 (2017).
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.
- Erman, Erwiza (ed.), *Sejarah Kesultanan Riau-Lingga Dalam Perspektif Hukum dan Budaya*, Jakarta, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Ghazali, Abdullah Zakaria, 'Daeng Chelak Ibni Daeng Rilekkek: Menelusuri Maklumat Daripada Teks Melayu', Jurnal Seri Alam, Jil.8, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2002.
- Hall, D.G.E, *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.

- Hamid, Wahyuddin, *Pasoppe Bugis Makassar II*, Jakarta: Telaga Zaman, 2005.
- Hooker, Virginia Matheson, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam* (Ahmad Fauzi Basri, penerjemah), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991).
- Ishak, Hikmat, *Warisan Riau: Tanah Melayu Indonesia yang Legendaris*, (2001), Yayasan Warisan Riau, Pekanbaru.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kusumah, Andi Ine, *Migrasi dan Orang Bugis*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.
- Lubis, Nabilah, *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*, Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2001.
- Malik, Abdul, dkk., *Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah*, Lingga: Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri, 2012.
- Omar, Arifin, *Bangsa Melayu: Konsep Bangsa Melayu dalam Demokrasi dan Komuniti 1945-1950*, Selangor: SIRDC, 2015.
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta Paris, 2006.
- Pursell, Victor *Orang-orang Cina di Tanah Melayu*, terjemah Nik Hasna Nik Mahmood, Johor: Universiti Teknologi Malaya, 1997.
- Putten, Jan Van der, dan Al Azhar, *Di dalam Berkenalan Persahabatan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Rahman, Abd., *Konsep Mamlakah dan Keharusan Mashlahah dalam Etika Kekuasaan Raja Ali Kelana*, Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Ritzer, Goerge dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimanda, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Samad, Raja Syofyan, *Negara dan Masyarakat: Studi Penerrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sjamsuddin, Helius, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Sofyan, Faisal, *Sejarah Persemendaan Melayu dan Bugis*, Tanjungpinang: Milaz Grafika, 2014.
- Surbakti, Ramlah, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1993.
- Suryani, Elis NS, *Filologi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Syahri, Asywandi dan Raja Murad, *Cogan: Regalia Kerajaan Johor Riau Lingga Pahang*, (2006), Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau.
- Taip, Rusphih Mohd. Asyraf., *Sejarah Politik Negeri Selangor: Kajian Berdasarkan kepada Teks: Hikayat Negeri Johor* (Latihan Ilmiah), Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2003.
- Turner , H. dan Alexander Maryanski, *Fungsionalisme*, terj. Anwar Efendi, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yacob, M. Amin, *Sejarah kerajaan Lingga: Johor-Pahang-Riau-Lingga*, Pekanbaru: Unri Press, 2004.
- Yunus, Hamzah, *Alihaksara Naskah-Naskah Kuno Riau*, Penyengat: Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu Riau Pulau Penyengat dan Yayasan Sosial Chevron dan Texaco Indonesia, 2001.